



Pemahaman Proses Bisnis

dalam rangka implementasi

SPIP yang efektif



Tujuan Pembelajaran

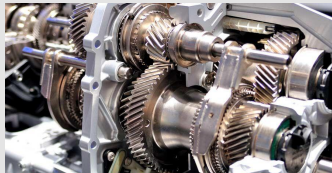
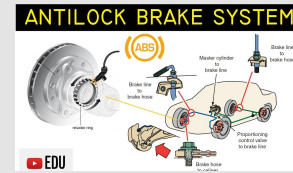
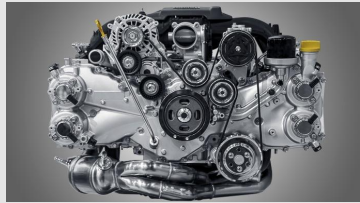
1. Peserta **memahami keterkaitan** proses bisnis dengan penyelenggaraan SPIP
2. Peserta **memahami definisi, unsur, dan hirarki** proses bisnis
3. Peserta **menganalisis** titik kritis dalam proses bisnis
4. Peserta **menerapkan analisis** proses bisnis dalam penyelenggaraan SPIP

What



Why How

1. Keterkaitan antara Proses Bisnis dengan Penyelenggaraan SPIP



**“Tanpa proses bisnis yang jelas (terdefinisi),
sulit untuk menerapkan pengendalian internal yang tepat (efektif)”**

2. Definisi Proses Bisnis

Thomas Davenport (1993): **Kumpulan tugas** yang **saling berhubungan** secara logis yang dilakukan **untuk mencapai hasil bisnis** yang ditentukan (*Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*).

Michael Hammer dan James Champy (1993): **Kumpulan aktivitas** yang **mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output** yang bernilai bagi pelanggan (*Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*).

Jan Vom Brocke dan Michael Rosemann (2015): **Kumpulan aktivitas** yang dilakukan secara **terkoordinasi** dalam lingkungan organisasi dan teknis **untuk mewujudkan tujuan bisnis** (*Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems*).

ISO/IEC 24702:2007: **Kumpulan satu atau lebih aktivitas** yang dilakukan oleh satu atau lebih entitas bisnis **untuk mencapai tujuan bersama** (ISO/IEC 24702:2007 *Information Technology — Business Operational View — Part 1: Specification and Methodology*).

Dumas et al. (2018): **Kumpulan aktivitas yang dilakukan** dalam **urutan tertentu** untuk **mencapai tujuan bisnis** tertentu (*Fundamentals of Business Process Management*).

Kumpulan aktivitas terkoordinasi yang mengubah input menjadi output untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Unsur-Unsur Proses Bisnis

- **Aktivitas:** Kegiatan atau penugasan dengan input dan output yang spesifik.
- **Input:** Sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas
- **Output:** Hasil akhir dari sebuah aktivitas
- **Pihak yang terlibat:** Individu, tim, unit kerja, atau lembaga yang berperan sebagai pelaksana aktivitas, baik internal maupun eksternal.
- **Mekanisme:** Alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas.
- **Tujuan yang ingin dicapai:** Keterkaitan aktivitas pada tujuan organisasi atau program, bisa dalam bentuk *outcome* atau *impact*.

2. Hirarki Proses Bisnis

Menggambarkan alur kerja yang saling berhubungan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah: Kompleksitas proses bisnis menentukan jumlah level hirarki.

I. Level 0: Proses bisnis keseluruhan instansi, terdiri atas tiga: Utama, Manajemen, dan Pendukung.

Proses Bisnis **Utama**: Memberikan nilai utama dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

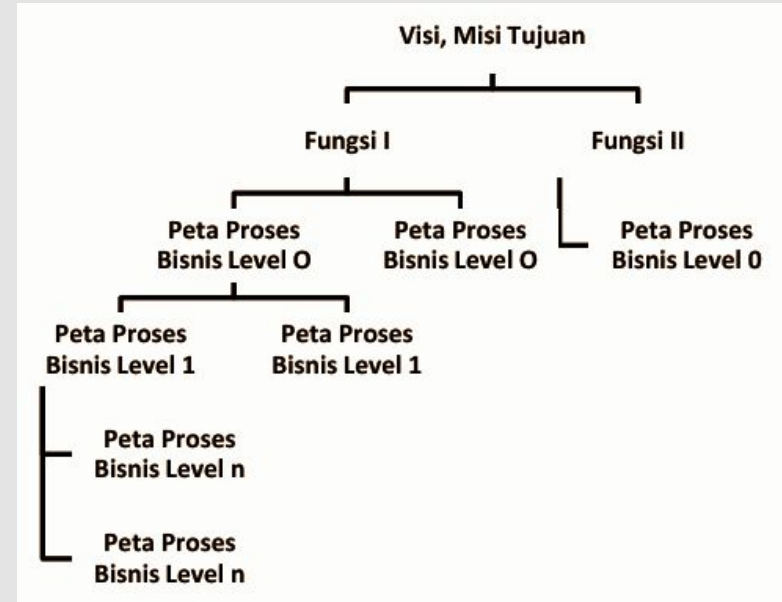
Proses Bisnis **Manajemen**: Mengelola operasional sistem dan memastikan proses bisnis utama berjalan baik.

Proses Bisnis **Pendukung**: Memaksimalkan aktivitas pada proses bisnis, serta memberi manfaat pada pemangku kepentingan.

Dasar Penentuannya dapat menggunakan Dokumen Rencana Strategis, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Dokumen Pendukung Lainnya.

II. Level 1: Penjabaran rinci proses bisnis Level 0 (tingkat unit organisasi)

III. Level N (dan seterusnya): Penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level di atasnya.



3. Titik Kritis dalam Proses Bisnis

Aktivitas krusial dalam proses bisnis yang kegagalannya akan berdampak besar pada pencapaian tujuan.

Dengan memahami dan mengelola titik kritis, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, **mengelola risiko**, dan memastikan bahwa proses bisnis tetap berada pada jalurnya, dalam rangka mencapai tujuan

Kriteria Identifikasi Titik Kritis:

- I. **Aktivitas Kunci:** Berdampak signifikan pada keberhasilan/kegagalan suatu program, serta berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan utama
- II. **Aktivitas dengan Sumber Daya Besar:** Membutuhkan alokasi dana, SDM, atau waktu yang signifikan, sehingga berisiko menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi kesalahan.
- III. **Aktivitas Lintas Pemangku Kepentingan:** Melibatkan banyak pemangku kepentingan atau eksternal (pihak/sektor), sehingga meningkatkan risiko miskoordinasi dan miskomunikasi.
- IV. **Permasalahan di Masa Lalu:** Aktivitas yang secara data sering menimbulkan masalah, yang menunjukkan kelemahan sistem yang perlu dianalisis lebih lanjut.
- V. **Pengendalian yang Tidak Ada/Lemah:** Meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan atau fraud.

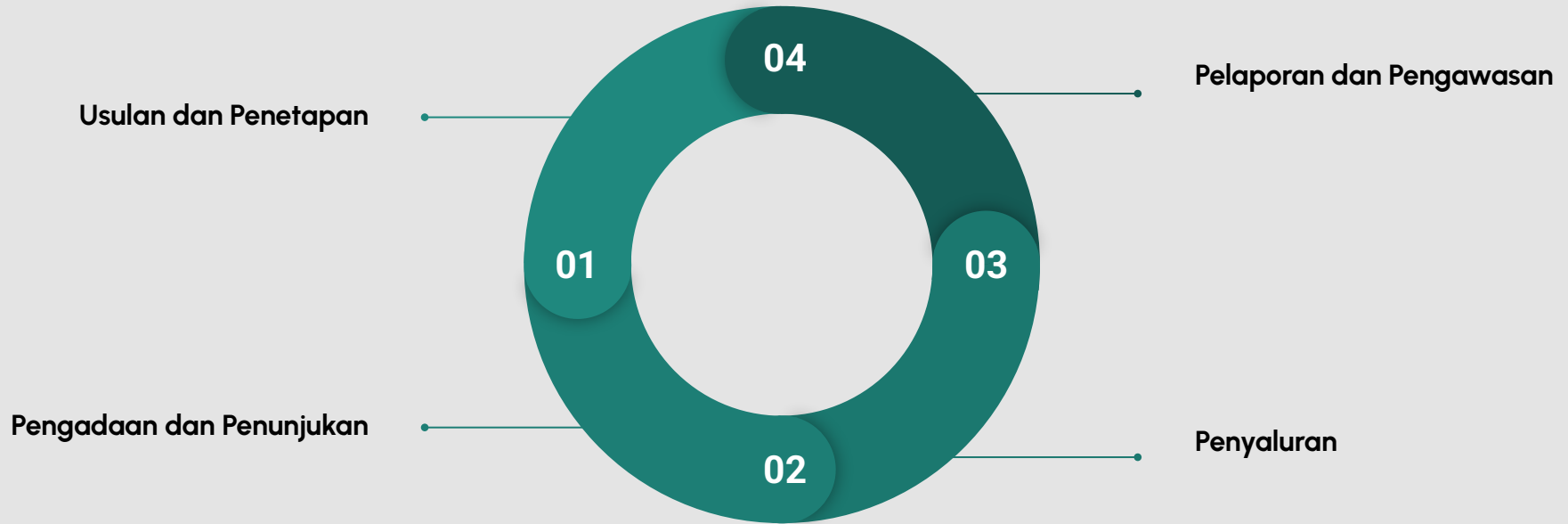
4. Studi Kasus Subsidi Pupuk

Perlu diperhatikan bahwa pemahaman terkait proses bisnis harus diawali dengan pemahaman regulasi yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut. Untuk studi kasus ini antara lain:

- UU Nomor 18 Tahun 2012 (Sistem Ketahanan Pangan)
- PP Nomor 26 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Bidang Pertanian)
- Permentan No. 10 Tahun 2022 (Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi)
- Permentan No. 1 Tahun 2024 (Perubahan atas Permentan No. 10 Tahun 2022)
- Permendag No. 4 Tahun 2023 (Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi)
- Kepmentan No. 249 Tahun 2024 (Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 2024)



4. Studi Kasus Subsidi Pupuk



Proses Bisnis pada tahap Usulan dan Penetapan

Aktivitas	Input	Output	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Tujuan yang ingin dicapai
Penyusunan dan Pengusulan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Data luas lahan petani, data jenis tanaman dan pola tanam, data anggota kelompok tani, Kartu Tani/KTP petani	Dokumen e-RDKK yang tervalidasi di aplikasi SIMLUHTAN, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi	Petani, Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian Kecamatan	SIMLUHTAN, musyawarah kelompok tani, verifikasi data oleh penyuluh	Mendapatkan data kebutuhan pupuk yang akurat dan mendukung ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi
Kompilasi Usulan Nasional dan Audit Data	Usulan alokasi pupuk dari seluruh provinsi, data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional, MoU BPKP	Hasil audit BPKP, Rekapitulasi kebutuhan pupuk nasional, rekomendasi alokasi pupuk nasional	Kementerian Pertanian, BPKP, Tim Verifikasi Pusat	SIMLUHTAN, audit dan verifikasi data, rapat koordinasi nasional	Mendapatkan data komprehensif untuk penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat nasional
Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat	Data e-RDKK, hasil audit BPKP, data luas baku lahan sawah yang dilindungi dan LP2B	Keputusan Menteri Pertanian tentang alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat	Kementerian Pertanian, BPKP, Menko Perekonomian	Rapat tingkat menteri, analisis e-RDKK melalui SIMLUHTAN	Menjamin tersedianya pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani secara nasional
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi	Hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan Menko Perekonomian	Keputusan Menteri Pertanian tentang HET pupuk bersubsidi	Kementerian Pertanian, Menko Perekonomian, instansi terkait	Rapat koordinasi antar instansi	Menjamin keterjangkauan harga pupuk bersubsidi bagi petani

Proses Bisnis pada tahap Pengadaan dan Penunjukan

Aktivitas	Input	Output	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Tujuan yang ingin dicapai
Pengadaan Pupuk Bersubsidi	Alokasi pupuk bersubsidi, perjanjian antara Kementan dan Holding BUMN Pupuk	Ketersediaan stok pupuk bersubsidi sesuai alokasi	Holding BUMN Pupuk, Produsen, Kementerian Pertanian	Produksi dalam negeri, impor (jika diperlukan)	Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara nasional
Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi	Persyaratan distributor (NIB, bukti penguasaan gudang, surat keterangan)	Surat Penunjukan Distributor, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Holding BUMN Pupuk dan Distributor	Holding BUMN Pupuk, Distributor, Dinas yang membidangi perdagangan dan pertanian	Sistem elektronik yang ditetapkan Holding BUMN Pupuk	Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi
Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi	Persyaratan pengecer (Nomor Izin Berusaha, bukti kepemilikan/ penguasaan sarana)	Surat Penunjukan Pengecer, SPJB antara Distributor dan Pengecer	Distributor, Pengecer, Holding BUMN Pupuk	Sistem yang ditetapkan oleh Distributor	Menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi ke petani

Proses Bisnis pada tahap Penyaluran

Aktivitas	Input	Output	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Tujuan yang ingin dicapai
Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Holding BUMN Pupuk ke Distributor	Stok pupuk bersubsidi, SPJB	Ketersediaan pupuk bersubsidi di gudang Distributor	Holding BUMN Pupuk, Distributor	Sarana pengangkutan yang terdaftar	Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Pengecer	Stok pupuk bersubsidi di gudang Distributor, SPJB	Ketersediaan pupuk bersubsidi di kios Pengecer	Distributor, Pengecer	Sarana pengangkutan dengan identitas khusus	Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan
Penyaluran (Penebusan) Pupuk Bersubsidi dari Pengecer ke Petani	Stok pupuk bersubsidi di kios Pengecer, Kartu Tani/KTP	Pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani	Pengecer, Petani/Kelompok Tani	Kartu Tani/KTP, pembelian tunai dengan harga tidak melebihi HET	Menjamin petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau

Proses Bisnis pada tahap Pelaporan dan Pengawasan

Aktivitas	Input	Output	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Tujuan yang ingin dicapai
Pelaporan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Data pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan stok	Laporan berkala pengadaan, penyaluran, dan stok pupuk bersubsidi	Holding BUMN Pupuk, Distributor, Pengecer, Kementerian terkait, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Sistem pelaporan elektronik	Menjamin transparansi dan akuntabilitas program pupuk bersubsidi
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Data penyaluran pupuk bersubsidi	Hasil verifikasi dan validasi	Tim verifikasi dan validasi pusat, Tim verifikasi dan validasi kecamatan	Pemeriksaan dokumen dan lapangan	Memastikan ketepatan sasaran program pupuk bersubsidi
Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Laporan pengadaan dan penyaluran, informasi dari masyarakat	Hasil pengawasan, tindakan korektif	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah	Pemeriksaan lapangan, analisis laporan	Menjamin pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan

4. Identifikasi Titik Kritis Subsidi Pupuk

Usulan dan Penetapan

Penyusunan dan
Pengusulan e-RDKK

Kompilasi Usulan Nasional
dan Audit Data

Penetapan Alokasi Pupuk
Bersubsidi Tingkat Pusat

Penetapan HET Pupuk
Bersubsidi

Pengadaan dan Penunjukan

Pengadaan Pupuk
Bersubsidi

Penunjukan Distributor
Pupuk Bersubsidi

Penunjukan Pengecer
Pupuk Bersubsidi

Penyaluran

Penyaluran Pupuk
Bersubsidi (PPB) dari
Holding BUMN Pupuk ke
Distributor

PPB dari Distributor ke
Pengecer

PPB dari Pengecer ke
Petani

Pelaporan dan Pengawasan

Pelaporan Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi

Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk
Bersubsidi

Pengawasan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi

Keterkaitan dengan Manajemen Risiko dan Pencegahan *Fraud*

- Pemahaman proses bisnis sangat penting untuk pelaksanaan manajemen risiko dan pencegahan *fraud*, karena **membantu mengidentifikasi titik kritis** (kerentanan).
- Pemahaman proses bisnis memungkinkan organisasi merancang pengendalian internal yang efektif - seperti pemisahan tugas dan monitoring transaksi - untuk mengurangi risiko *fraud*.
- Kegagalan SPIP sering terjadi akibat kurangnya pemahaman proses bisnis, sementara keberhasilannya bergantung pada penilaian risiko secara reguler.

Tugas Kelompok

1. Pilih salah satu peta proses bisnis level 0 Kementerian Hukum dan satu peta sub proses bisnis di unit kerja eselon I
2. Identifikasi unsur-unsur proses bisnis pada proses bisnis tersebut (aktivitas, input, output, pihak yang terlibat, mekanisme, dan tujuan yang ingin dicapai)
3. Identifikasi dan analisis titik kritis dalam proses bisnis tersebut
4. Tuangkan hasil analisis dalam bentuk tabel sebagaimana slide 14 dan 15

Nama Proses Bisnis/ Sub Proses Bisnis:		Proses Bisnis/ Sub Proses Bisnis			
Aktivitas	Input	Output	Pihak Yang Terlibat	mekanisme	Tujuan yang ingin dicapai

Titik Kritis Proses Bisnis/ Sub Proses Bisnis....	Alasan Titik Kritis
1.....	
2. Dst...	



Terima Kasih

